



SKRIPSI

**KOMBINASI SISTEM PRESIDENSIAL DENGAN SISTEM
MULTI PARTAI TERHADAP PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945**

**COMBINATION PRESIDENTIAL SYSTEM WITH
MULTYPARTY SYSTEM ON GOVERNMENT UNDER
CONSTITUTION OF REPUBLIC INDONESIA 1945**

Oleh:

ANDRIK BUDI WAHONO

NIM 050710191023

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

SKRIPSI

**KOMBINASI SISTEM PRESIDENSIAL DENGAN SISTEM
MULTI PARTAI TERHADAP PENYELENGGARAAN
Pemerintahan Menurut Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945**

**COMBINATION PRESIDENTIAL SYSTEM WITH
MULTYPARTY SYSTEM ON GOVERNMENT UNDER
CONSTITUTION OF REPUBLIC INDONESIA 1945**

OLEH:

ANDRIK BUDI WAHONO

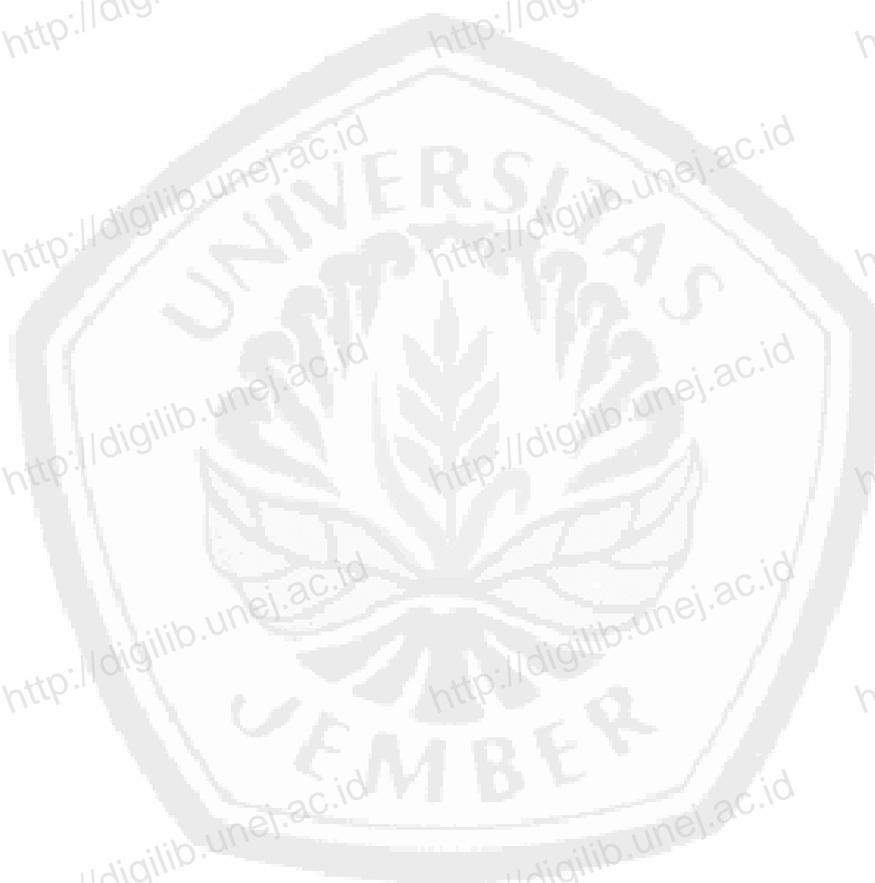
NIM 050710191023

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2011

MOTTO

Umar ra : Rosullah saw : Seorang penguasa yang berkuasa terhadap rakyatnya akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinannya itu (HR. Muslim, 37)¹

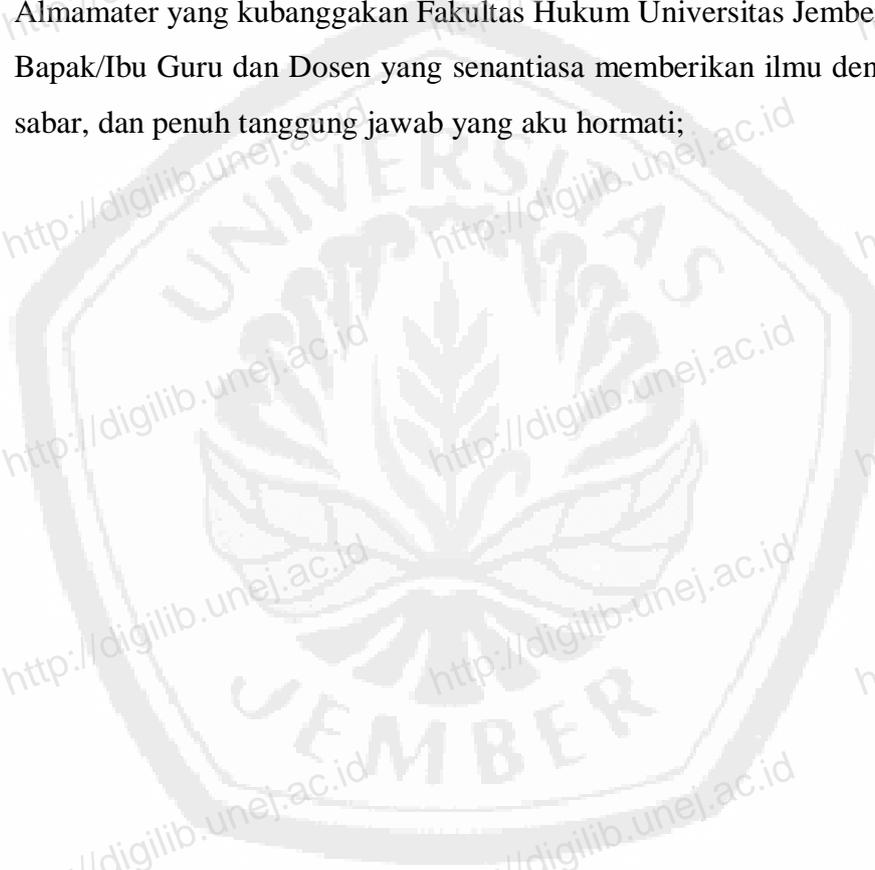


¹ <http://bukubagus.multiservers.com> tanpa tahun “Hadist untuk pegangan sehari-hari” hlm. 4

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak SUDIONO dan Ibu KAENAH yang tak mungkin terbalaskan atas segala pengorbanan, motivasi, nasehat, do'a, dukungan dan kasih sayang serta kepercayaannya yang diberikan selama ini demi kesuksesanku;
2. Almamater yang kebanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru dan Dosen yang senantiasa memberikan ilmu dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab yang aku hormati;



**KOMBINASI SISTEM PRESIDENSIAL DENGAN SISTEM
MULTI PARTAI TERHADAP PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945**

**COMBINATION PRESIDENTIAL SYSTEM WITH
MULTYPARTY SYSTEM ON GOVERNMENT UNDER
CONSTITUTION OF REPUBLIC INDONESIA 1945**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

ANDRIK BUDI WAHONO

NIM 050710191023

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

JEMBER

Tanggal Ujian 17 juni 2011

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 01 juni 2011

Oleh

Pembimbing

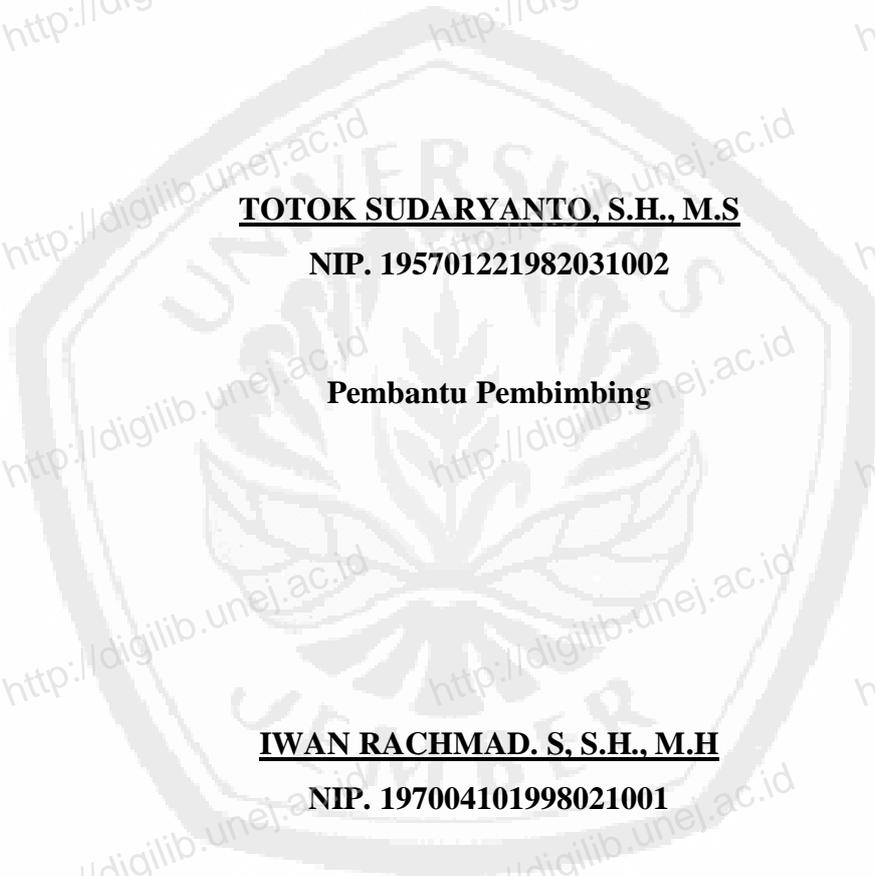
TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S

NIP. 195701221982031002

Pembantu Pembimbing

IWAN RACHMAD. S, S.H., M.H

NIP. 197004101998021001



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

KOMBINASI SISTEM PRESIDENSIAL DENGAN SISTEM MULTI PARTAI TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Oleh :

ANDRIK BUDI WAHONO

NIM 050710191023

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S

IWAN RACHMAD. S, S.H., M.H

NIP. 195701221982031002

NIP. 197004101998021001

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : JUMAT

Tanggal :17

Bulan : JUNI

Tahun :2011

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

ANTIKOWATI, S.H.,M.H

ROSITA INDRAYATI,S.H.,M.H

NIP.196112021988022001

NIP.197805312005012001

Anggota Penguji

TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S

NIP. 195701221982031002

IWAN RACHMAD. S, S.H., M.H

NIP. 197004101998021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : ANDRIK BUDI WAHONO

Nim : 050710191023

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul “**KOMBINASI SISTEM PRESIDENSIAL DENGAN SISTEM MULTI PARTAI TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945**” adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 juni 2011

Yang menyatakan

ANDRIK BUDI WAHONO

NIM. 050710191023

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum. Skripsi ini berjudul **“KOMBINASI SISTEM PRESIDENSIAL DENGAN SISTEM MULTI PARTAI TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945”**.

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, serta berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S, Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini sekaligus Dosen Wali selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H. Ketua Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. Sekretaris Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Pembantu Dekan I, II, dan III;
6. Bapak/Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama masa studi;
7. Staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu selama kuliah;

8. Ibuku Kaenah dan Bapakku Sudiono serta kakak-kakaku tercinta yang selalu memberikan kasih sayang dan doa demi harapan dan kesuksesan;

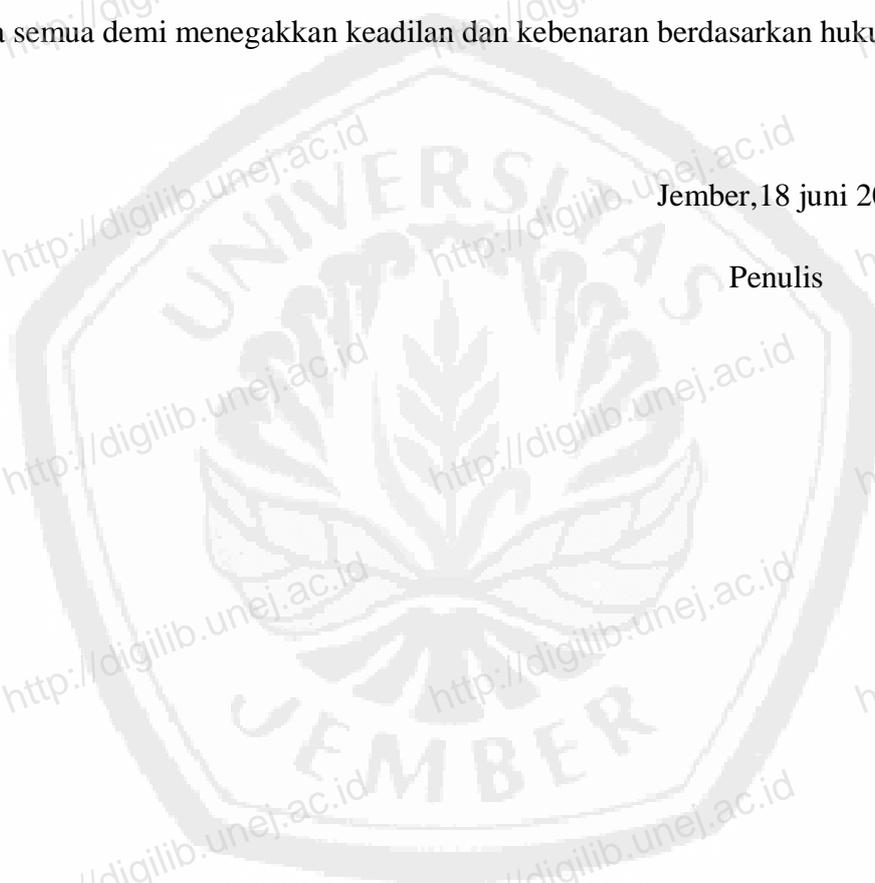
9. Dan seterusnya.....

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 18 juni 2011

Penulis



RINGKASAN

Salah satu aspek yang menentukan penyelenggaraan negara adalah sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara. Sistem pemerintahan menunjuk pada pembagian kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara, khususnya antara eksekutif dan legislatif. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan Indonesia dinilai sementara oleh sejumlah kalangan tidak secara tegas memenuhi ciri-ciri umum, baik Presidensial apalagi Parlementer. Oleh karena itu, salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuat Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999 adalah “Kesepakatan untuk mempertegas sistem Presidensiil. Selain itu dengan adanya reformasi, demokrasi di Indonesia semakin berkembang yang ditandai dengan banyaknya bermunculan partai-partai politik (sistem multi partai) yang mewarnai sistem Presidensial yang telah ditetapkan. Sebenarnya sistem multipartai secara teoritis dapat dikatakan sangat sesuai dengan kondisi objektif bangsa Indonesia yang sangat heterogen dengan berbagai perbedaan budaya, agama, suku, bahasa, golongan dan kedaerahan.

Dengan banyaknya partai politik yang ada, Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi yang menganut kombinasi sistem pemerintahan presidensial dengan sistem multi partai. Tidak adanya partai mayoritas yang menguasai DPR, menyebabkan hilangnya akumulasi kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu partai dalam pengambilan keputusan di DPR. Tentu banyaknya partai politik yang ada akan mempengaruhi jalannya pemerintahan yang berkembang di negara ini. Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan sistem Presidensiil dan sistem multipartai menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Apakah kombinasi sistem Presidensiil dengan sistem multi partai dapat digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan Undang-Undang dan konseptual.

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta analisa bahan hukum. Pada bab pembahasan, akan membahas mengenai 2 (dua) hal yang terdapat dalam rumusan masalah.

Pengaturan Sistem Presidensiil dan Multi Partai, sistem Presidensiil secara eksplisit dapat diketahui dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*”. Sedangkan pengaturan Sistem Multi Partai dapat diketahui pada proses pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) yang berbunyi “*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai*”.

Penerapan Kombinasi Sistem Presidensiil dan Multi Partai Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Indonesia telah membuktikan bahwa sistem presidensiil yang dikombinasikan dengan sistem multi partai dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai sejak tahun 1999 – sampai saat ini.

Agar lebih memperjelas apakah Indonesia menerapkan sistem presidensiil murni ataukah campuran harus hal ini harus dinyatakan dengan tegas didukung dengan penyempurnakannya dalam Undang-Undang Dasar sehingga keinginan menerapkan sistem presidensiil sesuai kesepakatan yang dibuat MPR pada Sidang Umum MPR 1999 tidak hanya sebatas teori sedangkan dalam prakteknya cenderung condong kepada sistem parlementer. Agar sistem pemerintahan presidensiil yang dikombinasikan dengan sistem multi partai berjalan secara efektif sebaiknya jumlah partai politik tidak terlalu banyak.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1.....	Latar
Belakang	1
1.2.....	Rumusa
n Masalah.....	4
1.3.....	Tujuan
Penelitian	4
1.4.....	Metode
Penelitian	5
1.4.1.....	Tipe
Penelitian.....	5
1.4.2.....	Pendeka
tan Masalah	5

1.4.3.....	Sumber	
Bahan Hukum.....		7
1.4.3.1.....	Bahan	
Hukum Primer.....		7
1.4.3.2.....	Bahan	
Hukum Sekunder.....		8
1.4.3.3.....	Bahan	
Non Hukum.....		8
1.5.....	Analisa	
Bahan hukum.....		8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....		10
2.1.....	Konsep	
Dasar Demokrasi.....		9
2.2.....	Partai	
Politik.....		17
2.2.1.....	Tujuan	
dan fungsi Partai Politik Menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.....		20
2.2.2.....	Hak dan	
Kewajiban Partai Politik Menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.....		21
2.3.....	Pemilih	
an Umum.....		23
2.4.....	Pemilih	
dan Pembatasannya.....		27
2.5.....	Sistem	
Pemerintahan Dalam Suatu Negara.....		27
2.5.1.....	Pengerti	
an Sistem Pemerintahan.....		27
2.5.2.....	Sistem	
Pemerintahan Presidensiil.....		28

2.5.3.....	Sistem pemerintahan Parlemerter.....	30
BAB 3. PEMBAHASAN.....		32
3.1.....	Pengaturan sistem Presidensiil dan sistem multipartai menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.....	32
3.1.1.....	Pengaturan Sistem Presidensiil.....	32
3.1.2.....	Pengaturan Sistem Multi Partai.....	38
3.2.....	Penerapan kombinasi sistem presidensiil dan sistem multi partai dalam penyelenggaraan pemerintahan.....	41
3.2.1.....	Pengaruh terhadap kondisi perpolitikan nasional.....	42
3.2.2.....	Pengaruh terhadap efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.....	45
BAB 4. PENUTUP.....		52
4.1.....	Kesimpulan.....	52
4.2.....	Saran-saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA